



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR : 132.13/KPTS/ 1/2017**

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 10 (SEPULUH) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan telah terpilihnya secara demokratis anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada 10(sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor: 140/127/2017 tanggal 25 April 2017, Perihal Pengusulan Nama – Nama Calon Anggota BPD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA** : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 Mei 2017

↓BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada

- Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Camat Loloda di Kedi
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 132.B/KPTS/1/2017

TANGGAL : 30 Mei TAHUN 2017

TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 10 (SEPULUH) DESA DI
KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	KAHATOLA	1. MUHDAR SALASA 2. BADRUN TJINA 3. NURHANI SALASA 4. FATAHUN SEHE 5. NURDIN BUKA	1. SUSILO BUNGA 2. SAFRI PUASA 3. NURHANI SALASA 4. ATNI SEHE 5. FATAHUN SEHE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
2.	BOSALA	1. FESTUS MORI 2. ADELINA SIDIKI 3. KISON PALI 4. MARKUS KODA 5. TOMAS PALI	1. FESTUS MORI 2. YUNINGSI BATALI 3. ALDINCE KUNDIMAN 4. FELIANUS MADESO 5. MARKUS KODA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
3.	BAKUN PANTAI	1. FENI TAKAWALUDE 2. APOLOS TALIAWO 3. YOKNI TJINA 4. ROYANI NIKANOR 5. JON MOHIBU	1. ALEXI LOTONO 2. JON MOHIBU 3. YUSUP MORAKA 4. ANDRI K. WANE 5. ARIS DJOLE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
4.	TOSOMOLO	1. YEHESKIEL PUNANA 2. YON MOHIBU 3. YORDAN SEBE 4. LABAN PUNANA 5. ALEXANDER PUNANA	1. DJON MOHIBU 2. YEHESKIEL PUNANA 3. ENGGELINA SAMALAGI 4. YULWEN MOHIBU 5. ELVIN TONI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
5.	BARATAKU	1. OBET TALIAWO 2. ICE MAHADUN 3. FONI MASANAE 4. ABSON HASANG 5. DOMINIKA MANGGARAI	1. RONAL TUANDALI 6. APSON HASANG 7. YULINDA TEHENE 8. OBET Y. TALIAWO 9. FONI MASANAE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
6.	GAMKAHE	1. YONATAN SIOM 2. MIHEL DAGILAH 3. MANASE TOTARI 4. HERBANUS SILILING 5. HERMANUS SERO	1. NAHOR MATERO 2. HERBANUS SILILING 3. STEVI SERO 4. MELSAN BATUI 5. JEMI SAKALATI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
7.	PUMADADA	1. AYUB DADERE 2. ABRAHAM UANG 3. HENGKI J. PUREN 4. RAPIAH SANTOSA 5. FENNI N. GAHIWU	1. AYUB DADERE 2. RIBMAR TAKAWALUDE 3. POTIFAR KUNDIMAN 4. HENGKI J. PUREN 5. HANS ANTONI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
8.	BAJA	1. MARGARENS EDO 2. LATIF PUASA 3. BENSELINA BALOHA 4. ALEXANDERMASANAE 5. ASIS DADERE	1. SIGAR MASANAE 2. JEFRI TAHE 3. DJABIR MARUF 4. YUSNI MARAS 5. YEFTA TALIWUNAN	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG

9	JANGAILULU	1. GABRIEL MAKACHEMING 2. YEPSEN MANDARASI 3. IRWAN POLI 4. MAGELHANS MASANAE 5. DELCI DJUMATI	1. YORES FEREI 2. ADHOPNI MAHADUN 3. JUNVANBERT MASANAE 4. IWAN POLII 5. DELCI JUMATI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
10	TUAKARA	1. NURDIN AMIN 2. IKRAM SADIK 3. MUJS MAYA 4. NURIATI DUDUAKA 5. FURKAN PASIMANYEKU	1. RUSLAN PASIMANYEKU 2. NURDIN AMIN 3. ABUBAKAR HAMISI 4. YUNI HAMISI 5. MUIS MAYA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	


DANNY MISSY

